

Penanggung Jawab:

José Luís de Oliveira

Redaksi: A. Castro, Nuno Hanjan, A. Neves, N. Katjasungkana, Sebastião da Silva, Octavia do Carmo, Rui Viana, F.X. Sumaryono, E. Saldanha, Nina Marques, Danino da Cunha, Julino Ximenes, T1, Rogério Soares, José C. Marçal. **Distribusi:** Martinho Viana

Cidadaun

Hamutuk Hari'i Nasaun Demokratiko

Penerbit:**Yayasan HAK**

Jl. Gov. Serpa Rosa T-091, Farol, Dili

Tel. + 670 390 313323

Fax. + 670 390 313324

e-mail: direito@yayasanhak.minihub.org

Dengan dukungan:



No. 11, Minggu III, Oktober 2001

F.X. SUMARYONO

• ISI NOMOR INI •



Berita Pemantauan

Hal. 3



Konstitusi

Hal. 5

OPINI

Valentim Ximenes, M.A. Hal. 2

BERITA PEMANTAUAN

Kursus di Luar Negeri Hal. 3

Perkembangan Komisi Tematis Hal. 3

Antara Kabinet dan Majelis Hal. 4

Konstituante Hal. 4

Memantau Kinerja Majelis Hal. 4

Konstituante Hal. 4

TATOLI

Harus Ada Fasilitas UNTAET Hal. 5

KONSTITUSI

Pelayanan Sosial Hal. 5

Menentukan Sistem Hukum Hal. 6

Hukum Adat Hal. 6

ADVOKASI

Lima Pasal Lingkungan Hal. 7

LIAFUAN

Rancangan Konstitusi Hal. 8

PROFIL

Armando da Silva Hal. 8

Cipriana da Costa Pereira Hal. 8



Rancangan Konstitusi dari Partai-Partai

• • •

Hasil pemilihan umum lalu telah menggolkan beberapa partai untuk duduk di dalam Majelis Konstituante. Dan seperti layaknya partai politik di manapun di dunia ini, mereka memiliki rencana dan program politik untuk kesejahteraan rakyat. Rencana dan program politik tersebut dituangkan dalam rancangan dokumen konstitusi, dokumen rancangan pembangunan atau dokumen *plataforma* partai untuk diperjuangkan dalam perdebatan di Majelis Konstituante atau parlemen untuk dijadikan program nasional bagi sebuah bangsa dan negara.

Di Timor Lorosae yang terjadi sekarang ini adalah partai-partai yang ada wakilnya di Majelis Konstituante menyampaikan rancangan untuk konstitusi negara Timor Lorosae. Proses penyusunan konstitusi ini telah memasuki tahap awal, yaitu peninjauan terhadap usulan kerangka konstitusi yang diusulkan oleh masing-masing partai, yang dilakukan oleh Komisi Sistematisasi dan Harmonisasi.

Sejak awal kesempatan menyerahkan usulan kerangka konstitusi, sudah terjadi debat yang sengit di antara anggota. Ada yang ingin supaya fraksi langsung mempresentasikan rancangan masing-masing, sedang sebagian lagi ingin agar rancangan disampaikan melalui anggota fraksi yang duduk di dalam komisi-komisi yang telah dibentuk. Kian maraknya debat seputar cara menyampaikan rancangan tersebut memunculkan kekhawatiran dan perasaan curiga dari sebagian anggota Majelis Konstituante. "Jangan-jangan sudah ada rancangan konstitusi jadi dari partai tertentu yang siap untuk disodorkan saja," begitu kira-kira kekhawatiran mereka. Kekhawatiran ini juga timbul karena partai-partai yang ada di Majelis Konstituante pasti menginginkan, agar paling tidak sebagian dari deretan panjang program yang telah dikeluarkan di masa kampanye dimasukkan dalam konstitusi Timor Lorosae, sebagai tanggungjawab dan ja-

minan mereka kepada masyarakat pemilih. Misalnya saja, jaminan pendidikan dan kesehatan gratis bagi keluarga kurang mampu yang merupakan program andalan partai KOTA dan pendirian dua bank yang menjadi program andalan Partido do Povo de Timor (PPT). Ketua dari dua partai ini telah menyatakan bahwa program-program mereka akan dipertahankan dalam debat substansi konstitusi nanti.

Menanggapi desas-desus bahwa ada rancangan jadi konstitusi dari partai-partai tertentu, Adérito de Jesus Soares, yang menjadi ketua Komisi Sistematisasi dan Harmonisasi, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap prasangka seperti itu. Menurutnya, tahap penyusunan konstitusi yang baru dimulai itu berjalan dengan sangat transparan dan melibatkan semua unsur kepentingan yang ada di Majelis Konstituante. "Kalaupun partai-partai memiliki rancangan konstitusi jadi, itu wajar-wajar saja karena mereka adalah organisasi politik yang mempunyai rencana besar mengenai nasib masa depan bangsa ini. Hanya saja, rancangan konstitusi harus melewati komisi-komisi yang telah dibentuk agar ide-ide terbaik yang ada di dalamnya dapat diperdebatkan dengan baik dan mendalam untuk dijadikan isi dari konstitusi kita nantinya," katanya.

Sejauh ini telah tiga partai yang menyerahkan rancangan konstitusinya kepada Komisi Sistematisasi dan Harmonisasi Majelis Konstituante untuk disampaikan kepada komisi-komisi tematis. Ketiga partai tersebut adalah FRETILIN, PSD, dan PPT. Dari ketiga usulan rancangan itu, hanya dua yang dijadikan referensi, yaitu dari FRETILIN dan rancangan konstitusi Timor Lorosae yang ditulis oleh ahli konstitusi Portugal Prof. Jorge Miranda yang diusulkan oleh PSD. Rancangan dari PPT tidak digunakan karena, menurut Ketua Komisi Tematis II Jacob Fernandes, rancangan tersebut tidak terstruktur dengan baik. •

Augusto Castro



Ketua Komisi Sistematisasi dan Harmonisasi Adérito de Jesus Soares (FRETILIN)

Saling Curiga

Sikap curiga sangat mewarnai perkembangan politik Timor Lorosae. Pada masa kampanye politik, yang merupakan pengalaman pertama bagi partai-partai politik Timor Lorosae, di sana-sini beredar desas-desus bahwa partai politik yang diduga kuat akan menjadi pemenang pemilu akan menjadi seperti Golkar, yang dikenal sebagai mesin politik yang sangat tidak demokratis. Dugaan ini berasal dari kecurigaan bahwa kemenangan mutlak akan membuat Majelis Konstituante tidak menjadi sarana demokrasi, dalam mana terjadi debat yang terbuka dan bermutu mengenai masalah-masalah dasar negara yang akan dibangun. Karena itu pihak-pihak tertentu berusaha keras agar tidak terjadi kemenangan mutlak salah satu partai.

Desas-desus tidak hilang setelah pemilu selesai. Ketika Majelis Konstituante mulai membahas rancangan tata-tertibnya, beredar desas-desus baru. Pembahasan rancangan berlangsung sangat alot. Sebagian memang karena terjadinya debat yang substansial. Tetapi lamanya waktu mencapai keputusan lebih banyak karena terjadinya debat kusir, yakni pembahasan yang bukan mengarah pada kejelasan mengenai duduk perkaranya, tetapi suatu perbantahan yang berlarut-larut, karena para anggota Majelis Konstituante mengajukan pendapat yang berbeda dengan yang telah diajukan sebelumnya hanya sekedar agar berbeda. Saat itu kemudian muncul desas-desus bahwa partai tertentu dalam Majelis Konstituante sengaja mengulur-ulur waktu, agar waktunya tidak cukup untuk menyusun konstitusi dan dengan demikian rancangan konstitusi partai tersebut bisa diterima menjadi konstitusi negara merdeka Timor Lorosae. Anehnya, pihak yang menjadi sasaran 'tuduhan' ini justru menganggap bahwa ada pihak yang sengaja mengulur waktu adalah partai lain karena memang dalam sidang-sidang tampak bahwa partai tersebut bersikap tidak bersahabat.

Gejala-gejala di atas memperlihatkan suasana saling curiga di antara para pemimpin partai-partai politik. Sikap seperti ini sangat mencolok menjelang pembentukan Kabinet Transisi Kedua oleh Administrator Transisi Sergio Vieira de Mello. Pemimpin sejumlah partai, entah sebagai taktik atau karena tujuan lain, menyatakan tidak mau masuk kabinet. Presiden Partido Social Democrata Mário Carrascalão, seorang tokoh yang dihormati banyak kalangan, bahkan menyatakan bahwa pihaknya tidak mau masuk kabinet karena tidak tahu apakah kabinet tersebut dibentuk oleh Sergio de Mello atau oleh Sekjen FRETILIN Mari Alkatiri. Padahal, seperti kabinet sebelumnya, kabinet yang sekarang dibentuk oleh Administrator Transisi dan bertanggungjawab kepadanya. Beberapa hari kemudian, Carrascalão malah mengatakan bahwa kalau FRETILIN masih bersikap seperti dulu, badan-badan internasional tidak akan mau memberikan bantuan kepada Timor Lorosae.

Jika dipikir secara dingin, kita akan bisa memaklumi mengapa muncul gejala-gejala di atas. Partai-partai politik, yang baru dikenal di Timor Lorosae pada tahun 1974, tidak bisa berkembang wajar akibat sejak awal sudah menjadi sasaran operasi intelijen pihak asing yang bermaksud menguasai negeri kecil yang sampai saat itu terisolasi dari perkembangan dunia. Akibatnya, berkembang sikap saling curiga yang sulit diatasi. Apalagi militer Indonesia menjalankan taktik adu domba antar orang Timor Lorosae sepanjang masa pendudukan. Belum lagi masalah tersebut teratasi, Timor Lorosae memasuki kompetisi antar partai yang juga baru dikenalnya dalam perlombaan yang disebut pemilihan umum, justru sebelum negeri ini memiliki konstitusi yang akan menjadi peraturan dasar untuk semua perlombaan.

Namun demikian, sikap saling curiga harus segera dihentikan agar demokrasi dan partisipasi rakyat – yang merupakan unsur pentingnya – bisa berkembang baik. Komunikasi politik yang sehat adalah jalan terbaiknya. Para pemimpin politik wajib mengembangkan komunikasi antar partai-partai politik, maupun antar para pemimpin politik dengan rakyat. Hal ini sangat penting dan mendesak sekarang, ketika para pemimpin itu harus menyusun peraturan dasar yang menentukan nasib seluruh bangsa ini. ^{Cidadaun}

• Pffu i i i i ! •

Dalam sidang pleno Clementino dos Reis Amaral (KOTA) mengatakan bahwa menurut kamus-kamus yang dibacanya, Majelis Konstituante berbeda dengan parlemen. Dr. Jacob Xavier dari Partido do Povo de Timor menimpali, "Kita jangan terpaku pada kamus... Saya kira kepala saya lebih besar dari kamus-kamus itu." Kalau semua wakil rakyat seperti Dr. Jacob Xavier, Majelis Konstituante tidak perlu perpustakaan lagi.



Komisi Tematik

Mencerminkan Konstitusi Demokratik

• Valentim Ximenes, MA •

Terbentuknya Komisi Tematik (KT) dalam Majelis Konstituante (MK) dapat menghapus pemikiran orang bahwa Konstitusi Negara Timor Lorosae pertama ini merupakan hasil pemikiran partai besar dalam hal ini FRETILIN. Juga pendapat bahwa FRETILIN akan berjuang habis-habisan untuk mengadopsi konstitusi tahun 1974. Pendapat itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sebaliknya, FRETILIN dalam perkembangannya di MK membuktikan kerjasama yang baik dan terbuka dengan partai-partai kecil. Ini terlihat melalui gaya kepemimpinan yang demokratis, sikap menghargai partai kecil yang tinggi, dan kemauan baiknya untuk menerima pendapat partai-partai kecil.

Lebih dari itu, MK berhasil menetapkan sebuah komisi yang disebut Komisi Sistematis dan Harmonisasi (KSH) yang bertugas menetapkan struktur atau sistematika rancangan konstitusi yang terpadu dan komprehensif. Sistematika itu disusun berdasarkan rancangan konstitusi dari semua partai di dalam MK. Selanjutnya, KSH membagi lagi semua anggota MK ke dalam empat KT. KT akan membahas secara detail isi konstitusi. Komposisi KT mencerminkan sifat pluralistik dan demokratis MK.

Pembentukan komisi-komisi diawali dengan diskusi mendalam mengenai rancangan konstitusi dari sembilan fraksi MK, yaitu FRETILIN, KOTA, PNT, PSD, PD, PPT, ASDT, PST, dan UDT. KSH menghargai rancangan-rancangan itu sebagai kerangka dasar guna menetapkan, mengkoordinir, dan kontabilisasi yang dibutuhkan sebagai pra-kondisi untuk mencari solusi. Pandangan-pandangan itu dirumuskan secara terpadu dalam satu teks yang bersifat koheren. Mereka semuanya mengakui bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dalam suasana yang demokratis. KSH menampilkan sesi-sesi beraturan secara efektif, dalam mana semua urusan dapat dianalisis secara mendalam dan didiskusikan.

Berdasarkan rancangan-rancangan itu, KSH menetapkan empat Komisi Tematik yang terdiri dari:

1. Komisi Tematik I tentang prinsip-prinsip fundamental/jaminan fiskalisasi, revisi konstitusi dan perampungan akhir, dan transisi;
2. Komisi Tematik II tentang organisasi pemerintahan negara/organisasi kekuasaan politik;
3. Komisi Tematik III tentang hak asasi, kewajiban dan kebebasan/pertahanan dan keamanan nasional;
4. Komisi Tematik IV tentang organisasi ekonomi dan sosial.

Jika dibandingkan dengan isi konstitusi negara-negara demokratik pada umumnya, empat KT itu telah memenuhi standar konstitusi demokratik yang ideal. Standar konstitusi yang demokratik mencakup empat isi utama:

1. *Pembukaan*, sebagai pengantar singkat konstitusi. Pembukaan mengnumerasi tujuan umum konstitusi.
2. *Pembagian dan pendistribusian kekuasaan dan fungsi pemerintah(an)*. Dalam negara demo-

kratis konstitusi menyediakan ruang bagi pembagian dan distribusi kekuasaan dan fungsi pemerintah dalam rangka menjamin supremasi hukum, dan menjamin hak dan kebebasan rakyat dari tekanan oleh orang yang berpakaian dengan kekuasaan politik. Di bawah doktrin pemisahan kekuasaan, pembagian dan distribusi kekuasaan dapat dilakukan oleh legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

3. *Hak dan kewajiban warganegara*. Hak asasi manusia dalam negara demokratis dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Beberapa di antaranya: (a) Hak sipil mencakup: kebebasan untuk hidup, hak atas kekayaan; kebebasan berbicara; kebebasan pers; kebebasan berserikat; kebebasan berkumpul; kebebasan beragama; dan kebebasan menuntut nama baik; (b) Hak politik, meliputi misalnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu dan lain-lain; (c) Kebebasan individu, antara lain hak menentang tindak kekerasan, hak menentang pencemaran nama baik, hak memperoleh perlindungan hukum, dan lain-lain; (d) Hak sosial dan ekonomi, seperti hak mendapat pendidikan yang layak, hak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk memperoleh perumahan yang memadai, dan seterusnya.

Sementara kewajiban warganegara mencakup paling sedikit lima hal: (a) loyal dan taat kepada negara; (b) mempertahankan negara jika negara dalam keadaan bahaya; (c) partisipasi aktif dalam pembangunan dan kesejahteraan negara; (d) menjunjung tinggi konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara; (e) melaksanakan hak memilih dan partisipasi dalam proses pemilu.

4. *Proses perubahan konstitusi*. Konstitusi yang demokratik menyediakan prosedur khusus untuk mengubah konstitusi. Ketentuan perubahan konstitusi dapat dihargai sebagai *charter* (piagam) kedaulatan.

Pelajaran berharga yang dapat dipetik di sini adalah bahwa empat KT telah mencerminkan konstitusi negara yang demokratis. Itulah yang memang diharapkan oleh rakyat pemilih di Timor Lorosae.

Para anggota MK harus mengesampingkan kepentingan partai politik dan menjunjung tinggi kepentingan rakyat dan negara. Jika janji yang ditawarkan dalam kampanye politik tentang "Constituição Consensual" [Konstitusi Konsensual] dijadikan sebagai patokan dalam debat konstitusi, berarti MK akan segera melahirkan sebuah konstitusi yang sekaligus menjadi instrumen negara dan simbol persatuan dan kesatuan bangsa Timor Lorosae. •

Valentim Ximenes, M.A. adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universidade Nacional Timor Lorosae (UNTIL) dan Koordinator Pendidikan Kewarganegaraan UNTIL, yang terlibat penuh dalam Constituent Assembly Debate Monitoring (Pemantauan Debat Majelis Konstituante).

Kursus di Luar Negeri Bagi Wakil Rakyat

Dua orang wakil rakyat diutus ke Australia dan Papua Nugini. Mereka mempelajari program pemberantasan korupsi.

• • •

Kemampuan intelektual dan kepekaan terhadap berbagai permasalahan sangat dibutuhkan oleh para wakil rakyat yang kini tengah menyusun konstitusi Timor Lorosae. Kemampuan itu tentu sangat penting. Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan mereka adalah dengan mengikuti seminar di berbagai negara. Untuk itu pada 5 Oktober lalu, Mari Alkatiri selaku Ketua Dewan Menteri yang sekaligus menteri ekonomi menyampaikan undangan untuk mengikuti seminar di Australia dan Papua Niugini kepada Lu Olo selaku Presiden Majelis. Seminar yang berlangsung pada 14-20 Oktober itu merupakan program UNDP yang bekerjasama dengan Inspektoral Geral ETTA.

Seminar atau kursus itu diikuti pula oleh dua orang anggota Majelis. Pimpinan Sidang kemudian memberikan kesempatan kepada para anggota Majelis untuk memutuskan siapa yang akan berangkat. Ir. Mário Carrascalão (PSD),

mengusulkan dua anggota itu sebaiknya laki-laki dan perempuan, masing-masing mewakili tingkat distrik dan nasional. Anggota Majelis kemudian memutuskan Leandro Isac (PSD) mewakili tingkat nasional dan Cipriana Pereira (FRETILIN) mewakili tingkat distrik. Ketika itu Leandro Isac menolak. "Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Selain itu, saya terlalu tua dan tidak menguasai bahasa Inggris. Di sini ada banyak anggota yang muda," katanya. Tetapi Pimpinan Sidang tetap menunjuknya untuk berangkat, karena panitia menyediakan semua fasilitas termasuk penerjemah.

Kepada *Cidadaun* Leandro Isac mengatakan, "Sebenarnya saya tidak mau melakukan sesuatu yang saya tidak ketahui. Saya tidak tahu di Australia saya akan mengikuti kursus apa." Hal senada juga diungkapkan oleh Cipriana Pereira. Hingga hari Jumat (13/10) ia belum tahu acara apa yang akan diikutinya. Anehnya lagi, Presiden Majelis ketika



Waktu senggang pun dimanfaatkan untuk berdiskusi.

• • •

dihubungi *Cidadaun* (15/10) pun tidak mengerti. "Saya hanya tahu mereka akan mengikuti kursus di Australia. Tetapi saya juga tidak tahu mereka akan mengikuti kursus tentang apa," kata Lu Olo.

Kejelasan informasi mengenai hal itu baru diperoleh dari Wakil Presiden Majelis Arlindo Marçal (PDC). "Kedua anggota Majelis akan mengikuti orientasi di Darwin dan Papua Niugini. Mereka akan melihat bagaimana kedua negara tersebut memberantas korupsi, dan sistem apa yang digunakan. Untuk membangun Timor Lorosae merdeka, kita memang harus mematikan

korupsi. Karena itu aturan mengenai pemberantasan korupsi perlu dituangkan dalam konstitusi. Sekitar dua minggu mereka akan di sana," katanya. Selain itu, anggota Majelis juga harus mempelajari dokumen-dokumen dan buku-buku tentang program anti-korupsi yang diberikan oleh Inspektur Jenderal Mariano Lopes da Cruz.

O, jadi tujuan dari keberangkatan kedua anggota Majelis itu agar Majelis lebih memahami masalah korupsi dan bagaimana memberantasnya. Setelah mereka pulang, siapa lagi anggota yang akan ke luar negeri? •

José Marçal

Perkembangan Pembahasan Komisi Tematis

Komisi-komisi tematis telah bekerja membahas substansi konstitusi. Mereka juga mengadakan dengar pendapat dengan berbagai kalangan.

• • •

Setiap Komisi Tematis (KT) menyusun substansi dan merumuskan kerangka konstitusi dengan mengumpulkan usulan yang disampaikan melalui fraksi-fraksi maupun perorangan. Keempat KT itu bekerja dengan mekanisme yang berbeda-beda. KT II yang bertugas membahas organisasi pemerintahan, termasuk yang cepat mencapai kesepakatan. Seperti dikatakan oleh Jacob Fernandes (FRETILIN) kepada para jurnalis (18/10) di Gedung Majelis, Komisi ini telah merumuskan kesepakatan mengenai pembagian kekuasaan, partisipasi politik warga negara; prinsip perubahan; prinsip pemilu; prinsip pemisahan kekuasaan dan hubungan saling ketergantungan kekuasaan lembaga-lembaga negara; serta partai politik dan hak oposisi. Sementara yang belum disepakati antara lain mengenai daerah administratif dan pemerintahan lokal.

Menurut Ketua KT II itu, bukan karena substansinya, tetapi lebih karena perbedaan pendapat tentang penempatannya. Fraksi FRETILIN menempatkannya pada prinsip umum, tetapi fraksi

lain ingin memasukkannya pada bab lain. Ada pula substansi yang diajukan oleh fraksi UDT, tetapi tidak ada dalam usulan fraksi-fraksi lain. Hal lain, kerangka konstitusi yang diajukan PPT tidak sistematis sehingga tidak dijadikan pembahasan. Usulan ini nanti akan dibawa ke pembahasan di sidang pleno.

Sampai berita ini diturunkan, *Cidadaun* belum memperoleh hasil pembahasan KT III yang membahas organisasi ekonomi, sosial, dan keuangan. António Cepeda (FRETILIN), anggota komisi ini mengatakan, KT III telah membahas semua kerangka yang diajukan oleh setiap fraksi. "Tetapi saat ini kami masih melakukan *public hearing* [dengar pendapat umum, *Red.*] untuk mendengarkan pendapat masyarakat," katanya.

KT III telah menyampaikan undangan kepada pakar ekonomi Dr. Lucas da Costa (Rektor Instituto Superior da Economia Gestão). Ia diminta memberikan masukan mengenai anggaran negara dan dukungan pemerintah untuk sektor pendidikan. Kadalac Sulimutuk Institute (KSI), suatu organisasi yang berge-



Deputado Osório Florindo (kanan).

• • •

rak di bidang studi dan pemberdayaan rakyat, diundang untuk berbicara mengenai masalah pertanahan. Selain itu, KT III juga mengundang pakar pertanahan dari Land and Property Unit dan pakar ekonomi dari Universidade Nasional Timor Lorosae.

KT I yang membahas tentang hak, kewajiban, dan kebebasan warganegara serta pertahanan dan keamanan negara dalam tahap pembahasan semua kerangka konstitusi seperti dikatakan Clementino dos Reis Amaral (KOTA). Amaral mengatakan, dalam pembahasan semua kerangka konstitusi, sering terjadi ketidaksepakatan terhadap istilah-istilah tertentu yang bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tentang bab-bab konstitusi, menu-

rutnya, masih belum disusun, karena beberapa fraksi belum merumuskannya. "Kami sangat hati-hati supaya padat dan sistematis, mewakili semua keinginan rakyat. Sehingga di kemudian hari tidak menjadi konsekuensi yang buruk bagi kita," kata bekas Sekjen Komnas HAM ini. KT I akan mengadakan dengar pendapat untuk mendapatkan usulan dan masukan dari masyarakat sebelum merumuskan konstitusi.

KT IV yang membahas tentang prinsip-prinsip fundamental negara dan revisi konstitusi, telah mencapai kesepakatan tentang prinsip fundamental. Menurut Osório Florindo (FRETILIN), sekarang sedang membahas lebih lanjut untuk mendapatkan masukan yang lain. •

Rogério Soares & Danino da Cunha

Antara Kabinet Dan Majelis Konstituante

Sejumlah *deputados* yang merangkap menjadi anggota Kabinet Transisi II mengundurkan diri dari Majelis Konstituante. Baik untuk penyusunan konstitusi?

• • •

Lima orang wakil rakyat dari berbagai partai telah mengundurkan diri dari Majelis Konstituante. Mereka sebelumnya merangkap jabatan di Kabinet Transisi II. Dari FRETILIN, Estanislau da Silva menduduki jabatan Menteri Pertanian, António Biano menjabat Menteri Pertanian, dan César Vital Moreira menjadi Menteri Pengairan dan Pekerjaan Umum. Dari Partido Democrático (PD) Fernando Araújo menduduki jabatan Wakil Menteri Luar Negeri untuk wilayah Asia dan Pasifik. Sedang dari União Democrática Timorese (UDT), Isabel da Costa Ferreira menjabat Penasehat Urusan Hak Asasi Manusia untuk Ketua Menteri.

Pengganti mereka telah ditunjuk oleh partai masing-masing. Dari FRETILIN adalah José Manuel da Silva Fernandes, Norberto José Maria Espírito Santo, dan Elizário Ferreira. PD menunjuk Rui da Costa, dan UDT menunjuk Quiteria da Costa.

Sebagian orang menganggap peng-

unduran diri dari salah satu jabatan ini baik, karena bagi mereka perangkapan ini tidak sesuai dengan demokrasi. Dalam demokrasi perwakilan yang diberlakukan beberapa negara, khususnya yang menganut sistem pemerintahan presidensial, dengan dasar bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan secara tegas antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, seseorang tidak boleh menduduki jabatan rangkap di eksekutif dan legislatif.

Namun, ada yang menyayangkan bahwa mereka itu justru mengundurkan diri dari Majelis Konstituante, padahal tugas yang diemban badan ini sekarang adalah yang paling penting bagi masa depan Timor Lorosae. Seorang aktivis pemuda yang tidak mau disebutkan namanya, menyayangkan mundurnya mereka, karena paling tidak sebagian dari mereka adalah orang-orang dengan keahlian yang diperlukan oleh Majelis Konstituante.

Pendapat tersebut cukup beralasan.

Perhatikan saja latar belakang orang-orang yang meninggalkan Majelis Konstituante. Estanislau da Silva adalah aktivis yang telah lama bergabung dengan FRETILIN. Ia lulus program master (S-2) dari sebuah universitas di Australia untuk bidang studi pembangunan. Kemungkinan besar ia adalah satu-satunya orang Timor Lorosae yang punya pengalaman bekerja di Asian Development Bank, dan pengalaman ini sangat berharga sebagai bekal untuk merumuskan kebijakan pembangunan Timor Lorosae, khususnya yang berkaitan dengan lembaga-lembaga keuangan multilateral dan masalah investasi asing.

Fernando Araújo, yang sekarang menjadi Presiden PD, adalah salah seorang aktivis yang paling mengenal Indonesia. Ia terlibat dalam gerakan *clandestin* di Timor Lorosae sejak masa CE (Comissão Executivo), dan sukses memperluas gerakan ini ke Indonesia ketika bersama sejumlah aktivis lain mendirikan RENETIL (1988) dan menjadi sekjennya sampai 1999. Di Indonesia, organisasi mahasiswa ini bekerja erat dengan organisasi-organisasi dari kalangan gerakan pro-demokrasi. Pemenjarannya di Cipinang, Jakarta membuatnya semakin dekat berhubungan dengan kalangan pro-demokrasi Indonesia. Jika Timor Lorosae mau membina hubungan yang erat dengan Indonesia yang demokratis, sesungguhnya Fernando Araújo adalah salah satu orang yang paling tahu bagaimana perspektif untuk mengembang-

kan hubungan tersebut. Juga dengan siapa hubungan itu harus dijalin.

César Vital Moreira dari FRETILIN adalah arsitek lulusan salah satu perguruan tinggi di Kupang. Setelah Timor Lorosae bebas dari Indonesia ia memperdalam pengetahuannya di bidang perencanaan kota. Ia juga sempat aktif sebagai salah seorang pengurus persatuan arsitek Timor Lorosae. Di sini sangat jarang orang punya keahlian bidang perencanaan kota dan ini sangat berguna bagi Majelis Konstituante sekarang ini.

Isabel Ferreira dari UDT adalah seorang sarjana hukum lulusan sebuah universitas di Denpasar, Bali. Ia sempat memperdalam pengetahuannya di Jakarta pada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KONTRAS). Ia juga sempat magang pada Yayasan HAK dan ketika KONTRAS mendirikan cabang di Timor Lorosae pada 1998, ia menjadi ketuanya. Setelah Indonesia meninggalkan Timor Lorosae, ia bersama sejumlah aktivis mendirikan Comissão dos Direitos Humanos de Timor Lorosae (CDHTL) dan menjadi direktornya. Sekitar pertengahan 2000 ia mendirikan Asosiasi Keluarga Korban Orang Hilang (AK-KOH). Dengan pengalaman itu, pengetahuannya di bidang hak asasi manusia tak diragukan lagi, yang tentu dibutuhkan oleh Majelis Konstituante ketika merumuskan ketentuan hak asasi manusia internasional dalam konstitusi. • NK

Memantau Kinerja Majelis Konstituante

Kinerja Majelis Konstituante dipantau oleh kalangan universitas dan organisasi masyarakat. Agar kualitas badan penyusun konstitusi ini terjamin.

• • •

Kekhawatiran sementara pihak bahwa Majelis Konstituante akan melakukan sidang-sidang secara tertutup ternyata tidak terbukti. Kekhawatiran ini berawal dari salah satu pasal dalam tata tertibnya yang menyatakan bahwa hanya orang yang dikenal Majelis Konstituante yang boleh menghadiri sidang. Seluruh sidang Majelis, bahkan sidang komisi-komisi tematisnya dilakukan secara terbuka, artinya siapa saja boleh menghadiri sidang asalkan menunjukkan kartu identitas kepada petugas penjaga.

Di ruang sidang utama Majelis Konstituante, pada bagian belakang tersedia deretan kursi yang disediakan untuk jurnalis dan siapa saja yang ingin mengikuti sidang. Di antara yang terlihat rajin mengikuti sidang ini adalah para pekerja sejumlah organisasi non-pemerintah dan dari universitas. Sebagian dari mereka memang mengadakan program pemantauan terhadap kerja Majelis Konstituante. Mereka mengamati dan mencatat sidang-sidang Majelis. Secara

umum tujuannya sama dengan tujuan pemantauan pemilu, yaitu berpartisipasi dalam peningkatan kualitas proses politik agar sesuai dengan asas demokrasi, dan melalui pemantauannya memberikan masukan demi perbaikan kerja Majelis.

“Saya melakukan pemantauan *full time*,” kata Valentim Ximenes, M.A., pakar politik dari Universitas Nasional Timor Lorosae, kepada *Cidadaun*. Sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan, universitas ini menyelenggarakan Pemantauan Debat Majelis Konstituante, yang dipimpinnya.

Menurut pemantauannya, proses sidang Majelis Konstituante berjalan dengan baik. Bahwa ada yang mengatakan banyak makan waktu, menurutnya ini biasa, karena banyak anggota yang berbicara dan memberikan ide. “Ini adalah konsekuensi demokrasi, yang baru dimulai di Majelis Konstituante,” lanjutnya. Selain itu, para wakil rakyat ingin bicara, tetapi kurang mengerti materi yang terbagi dalam banyak perspektif. Perbedaan pikiran dari kelom-



Para anggota *bancada* PSD rapat di Majelis Konstituante.

• • •

pok-kelompok ini yang membuat banyak memakan waktu, tetapi menurutnya secara umum proses pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris dan pembentukan komisi teknis telah berjalan secara demokratis dan baik.

Menurutnya FRETILIN yang dominan di Majelis sangat menghargai partai-partai kecil. Meskipun berlaku sistem *voting* dengan angkat tangan, tidak berarti bahwa hak minoritas diabaikan. Semua anggota dari semua partai bebas berdiskusi dan menyerang secara terbuka atas masalah yang penting. Saran dan pendapat partai kecil justru dihargai oleh partai mayoritas. Valentim Ximenes menunjuk sebagai buktinya diterimanya usulan João Carrascalão

agar setelah rancangan konstitusi selesai disusun dilakukan konsultasi dengan rakyat.

Tentang anggota Majelis yang tidak disiplin waktu, menurutnya, ini adalah masalah besar dan merupakan hal negatif. “Mereka mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan aspirasi, tetapi mereka juga mempunyai kewajiban yang sama dalam mentaati aturan, misalnya masuk dan keluar sesuai waktu,” katanya.

Selain UNATIL, sementara ini yang mengadakan pemantauan adalah organisasi pemuda RENETIL (Resistência Nacional dos Estudantes de Timor Leste) dan kelompok pemantau yang dibentuk oleh NGO Forum. •